



# Ekonomi & Pendidikan

Wadah Kreativitas dan Olah Pikir Ilmiah

Dampak Krisis Finansial Amerika Serikat Terhadap Perekonomian Asia  
Oleh: Teguh Sihono

Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai  
Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah?  
Oleh: Sugiharsono

Spirit Ekonomi UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999:  
Sebuah Tinjauan Umum  
Oleh: Maimun Sholeh

Komunikasi Sebagai Salah Satu Kunci Keberhasilan Inflation Targeting  
Oleh: Bambang Suprayitno

Business Plan Sebagai Langkah Awal Memulai Usaha  
Oleh: Supriyanto

Peningkatan Minat Belajar dan Pemahaman Mahasiswa  
Melalui Penerapan Problem-Based Learning  
Oleh: Ali Muhsin

Kesiapan Sekolah Menengah Atas dalam  
Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta  
Oleh: Mustofa

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**KESIAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM IMPLEMENTASI  
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN  
DI KOTA YOGYAKARTA**

Oleh: Mustofa

*(Staf Pengajar FISE Universitas Negeri Yogyakarta)*

**Abstract**

A number of schools in Yogyakarta have been trying to implement the KTSP. However, schools still struggle to understand the curriculum. The government has stated that schools which are ready can implement the KTSP by 2007, and those which are not can postpone the implementation until the end of 2009/2010. A study of the schools' readiness to implement the KTSP was conducted at four schools in Yogyakarta. The research aims at (1) describing the schools' readiness to implement the KTSP; (2) identifying the needs of the school to implement the KTSP; (3) finding out the supporting and inhibiting factors of the KTSP implementation. The readiness to implement the KTSP varied from one school to another. The varieties include several aspects, such as: curriculum properties, facilities, finance, environment, principal's leadership, teachers and staffs' readiness, and parents and students' readiness. It was also revealed that what were needed by the schools to implement the KTSP were commitment and financial support from the government and teachers' understanding of the curriculum through training. The inhibiting factor was inconsistent policy.

Kata Kunci: Kesiapan, Implementasi, dan KTSP

**A. Pendahuluan**

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) membutuhkan kesiapan bukan saja dari sekolah, melainkan dukungan dari pelbagai pihak, baik orangtua, birokrasi dan administrator pendidikan, serta masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan KTSP harus ditangani secara profesional dengan tingkat pemahaman yang baik dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, apakah sekolah yang dijadikan basis dalam perubahan dan pengembangan kurikulum sudah siap dalam implementasinya? Sekolah dituntut untuk profesional dalam menangani segala persoalan pendidikan. Jangan sampai sebagai pelaksana pendidikan, sekolah justru tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Hal penting untuk segera dilakukan adalah bagaimana

menyiapkan sekolah-sekolah agar siap mentransfer perubahan melalui peranannya sebagai pengembang KTSP. Implementasi kurikulum, khususnya KTSP menuntut partisipasi warga sekolah yakni kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan peserta didik, untuk aktif dan kreatif mengembangkan kurikulum yang telah direncanakan sendiri oleh sekolah. Ketentuan pemerintah menandaskan bahwa sekolah-sekolah yang sudah siap, dapat melaksanakan KTSP mulai tahun ajaran 2006/2007, akan tetapi sekolah yang belum siap, harus dilakukan paling lambat tahun ajaran 2009/2010.

Mulyasa (2006:34) mengungkapkan bahwa implementasi kurikulum sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasan bagi pengguna di sekolah; (2) strategi implementasi yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, dan (3) karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru terhadap kurikulum serta kemampuannya untuk merencanakan kurikulum dalam pembelajaran. Mengimplementasikan suatu program baru di sekolah tidak akan lepas dari kendala atau rintangan-rintangan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan adanya kendala dalam proses implementasi tersebut perlu adanya persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah.

Sukmadinata (1997) menyatakan bahwa kendala-kendala dalam proses implementasi kurikulum adalah: (1) tidak adanya keseragaman, oleh karena itu untuk daerah dan situasi yang memerlukan keseragaman dan persatuan atau kesatuan nasional, (2) tidak adanya standar penilaian yang sama, sehingga sukar untuk memperbandingkan keadaan dan kemajuan suatu sekolah dengan sekolah lain, (3) sukar melakukan pengelolaan dan penilaian secara nasional, (4) belum semua sekolah memiliki kesiapan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat menjadi penting sekali apabila implementasi KTSP ini kesiapan sekolah sudah benar-benar matang dan didukung oleh segenap komponen yang membentuk sekolah. Dalam rangka mengetahui kesiapan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Yogyakarta di dalam implementasi KTSP dan mengetahui faktor penghambat serta pendukungnya maka diperlukan studi eksplorasi tentang kesiapan sekolah tersebut.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan**

Menurut Sukmadinata dalam Muhammad Joko Susilo (2007), kendala tersebut ialah: (1) tidak adanya keseragaman, (2) tidak adanya standar penilaian yang sama,

(3) sukar untuk melakukan pengelolaan dan penilaian secara nasional, (4) belum semua sekolah/distrik memiliki kesiapan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Kendala tersebut dapat diatasi dengan lebih banyak melibatkan guru. Guru dilibatkan bukan dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan/catur wulan atau satuan pelajaran, tetapi juga untuk menyusun kurikulum menyeluruh di sekolahnya. Jika sejak awal guru dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, mereka akan memahami benar substansi kurikulum dan cara implementasinya secara tetap.

Dalam rangka untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, maka sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses implementasi kurikulum perlu memikirkan dan berupaya untuk melakukan suatu tindakan-tindakan persiapan, berkenaan akan diterapkannya kurikulum satuan tingkat pendidikan. Ada dua hal pokok yang perlu disiapkan pihak sekolah, yaitu mencakup kesiapan materiil dan nonmaterial. Kesiapan materiil dapat berupa kesiapan sekolah berkenaan dengan materi yang sifatnya kebendaan seperti perangkat kurikulum, sarana prasarana sekolah (laboratorium, ruang belajar, perpustakaan dan lain-lain), unsur keuangan, dan unsur lingkungan sekolah. Sedangkan kesiapan nonmaterial dapat berupa tenaga pendidikan yang handal dan profesional (kepala sekolah/guru), kesiapan karyawan maupun kesiapan dari unsur kesiswaan dan orang tua siswa. Dan dalam dua hal inilah yang akan menjadi bahan kajian di dalam penelitian ini. Apakah pihak sekolah sudah benar-benar melakukan persiapan baik materiil maupun nonmaterial berkenaan akan diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut.

## 2. Kesiapan Materiil/Sumber Daya Alamiah Sekolah

Bentuk kesiapan materiil sekolah dapat dilihat dari dimensi perangkat kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, keuangan, dan lingkungan sekolah yang mencakup lingkungan fisik (gedung) dan lingkungan sosial.

### a. Perangkat Kurikulum

Perangkat kurikulum merupakan sarana penunjang dalam pencapaian keberhasilan kegiatan pembelajaran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Untuk itu setiap guru dituntut untuk menyiapkan dan memerencanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran secara optimal, maka guru harus melakuakn hal-hal sebagai berikut: 1) mengkaji dan memahami struktur program kurikulum yang berlaku, 2) memahami tujuan pengajaran, 3) mengkaji materi pelajaran, 4) mengakaji dan mengembangkan berbagai metode penagajaran yang tercantum dalam kurikulum, 5) mengetahui

tata urutan penyajian dan alokasi waktu yang tersedia, 6) mengkaji dan mengembangkan sarana pembelajaran, 7) mengkaji dan mengembangkan cara penilaian proses hasil belajar, 8) mengembangkan kurikulum dalam tahunan, program cawu, dan persiapan mengajar, 9) memahami buku pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum, 10) memiliki buku referensi yang memadai, 11) mengembangkan dan memanfaatkan sumber belajar (Depdikbud, 1995).

b. Sarana dan Prasarana

Pengertian sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar.

c. Keuangan

Chon (Fattah, 2000) mengatakan bahwa biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, sekolah maupun orang tua. Sedang biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan siswa selama belajar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46 ayat (1) bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

d. Lingkungan

Dimensi lingkungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan fisik dan lingkungan social. Lingkungan fisik lebih cenderung dikaji dari sisi bangunan yang berada di sekitar sekolah, sedangkan lingkungan sosial dilihat dari kondisi masyarakat di sekitar sekolah. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sama-sama memberikan kontribusi yang positif.

### 3. Kesiapan Nonmaterial/Sumber Daya Manusia Sekolah

Bentuk kesiapan nonmaterial sekolah dapat dilihat dari dimensi kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua. Fokus kajian yang dimunculkan hanya

sebatas pada peran yang diberikan masing-masing dimensi dalam melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Tugas kepala sekolah adalah bertanggung jawab atas sekolahnya dalam melaksanakan berbagai kegiatan, seperti bagaimana mengelola berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan maupun penerapan sarana dan prasarana. Kaitannya dengan tugas dan fungsi kepala sekolah Permadi (1999) sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kepala sekolah mempunyai fungsi sebagai *educator* (guru), *manager* (pengarah, penggerak sumber daya), *administrator*, *supervisor* (pengawas, pengoreksi dan melakukan evaluasi).

b. Guru dan Karyawan

Kaitannya dengan implementasi kurikulum, maka guru perlu memerhatikan hal-hal berikut: (1) mengurangi metode ceramah, (2) memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik, (3) mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, (4) bahan harus dimodifikasi dan diperkaya, (5) jangan ragu untuk berhubungan dengan spesialis bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan, (6) gunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan membuat laporan, (7) ingat bahwa peserta didik tidak berkembang dalam kecepatan yang sama, (8) usahakan mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap anak bekerja dengan kemampuannya masing-masing pada tiap pelajaran, (9) usahakan untuk melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan (Mulyasa, 2002).

c. Siswa

Siswa merupakan bagian penting dari sekolah dan agar tidak terjadi keruwetan dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, maka perlu diadakan penelahaan tentang siswa. Hal ini berkaitan dengan dasar pertimbangan dalam pengembangan suatu perencanaan pengajaran, seperti: menentukan jenis, luas dan bobot bahan pengajaran yang akan disajikan, cara penyampaian yang akan dilakukan dan kegiatan-kegiatan belajar lainnya (Hamalik, 2003).

d. Orang tua/Komite Sekolah

Orang tua dapat dikatakan sebagai salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab bagi kesuksesan program-program sekolah. Artinya, keberhasilan sekolah sangat ditentukan seberapa jauh tingkat partisipasi orang tua terhadap implementasi program-program yang diselenggarakan sekolah. Ada korelasi antara kemajuan dan kualitas sekolah dengan tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya (Anik, 2003).

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian eksploratif kuantitatif yang dipadu dengan metode kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan secara eksploratif fenomena yang berupa kuantitas, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memaknai secara verbal temuan-temuan penelitian sesuai dengan kualitas data penelitian. Data dikumpulkan dari penelitian SMA di Kota Yogyakarta yang mengambil sampel seluruh SMA Negeri di Kota Yogyakarta yang berjumlah 11 SMA Negeri.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang berupa kuesioner, pedoman wawancara dan observasi. Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang penataan kelembagaan sekolah melalui wawancara dan angket dengan Kepala Sekolah, proses di kelas melalui wawancara dengan guru, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah yang telah melaksanakan KTSP dan dikembangkan berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian. Data dianalisis sesuai dengan jenis dan karakteristik informasi yang diperoleh. Untuk itu dilakukan tabulasi data atau penyajian data dalam bentuk matriks untuk melakukan klasifikasi hasil-hasil penelitian. Selanjutnya, data dianalisis, dievaluasi, dan ditafsirkan secara objektif.

### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Kelengkapan Dokumen KTSP**

Berikut tabel kepemilikan dokumen kelengkapan SI, SKL, dan KTSP di empat sekolah SMA Kota Yogyakarta yang mulai disosialisasikan sejak tahun 2006. Pada umumnya sekolah/satuan pendidikan mendapat dokumen tersebut dengan berbagai cara melalui mengkopi sendiri dalam bentuk file, CD, cetakan, dari dinas pendidikan maupun pihak lainnya.

Tabel 1 memberikan gambaran bahwa secara umum kepala sekolah menyatakan telah memiliki dokumen KTSP. Ini berarti, sumber acuan pengembangan KTSP telah dimiliki oleh sekolah-sekolah tersebut. Namun terdapat perbedaan pernyataan antara kepala sekolah dan guru. Frekuensi kepala sekolah yang telah menerima dokumen tersebut lebih tinggi dari pada guru. Perbedaan ini menunjukkan bahwa mungkin saja sebagian kepala sekolah belum sempat menyampaikan dokumen tersebut kepada guru oleh karena berbagai alasan. Sayangnya tim peneliti tidak sempat melacak alasan mengapa terjadi perbedaan yang cukup signifikan.

## 2. Pemahaman Isi dokumen berkaitan KTSP

Sebagian besar responden (Kepala sekolah 90,90 %, guru 82,82%) menyatakan mudah memperoleh dokumen KTSP. Bagi yang sudah memperoleh, umumnya responden (Kepala Sekolah 100%, Guru 82,82%,) menyatakan sudah mempelajari. Bagi kepala sekolah yang belum memperoleh dokumen tapi sudah pernah mendapatkan informasi tentang peraturan tersebut. Mereka mendapatkan informasi tersebut dari Kepala Dinas, pengawas atau teman sejawat yang pernah mengikuti sosialisasi. Sedangkan bagi para guru, mereka mendengar dari Kepala Sekolah dan teman. Perlu dilakukan berbagai upaya agar pemahaman tentang kebijakan pengembangan dan penerapan KTSP oleh satuan pendidikan memiliki persepsi yang sama, fleksibel, sesuai kondisi sekolah. Hal ini dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk sosialisasi saja tetapi juga melalui workshop dengan menggunakan media langsung (rapat kerja), media cetak, media televisi radio, dan internet secara interaktif, dengan menggunakan bahan yang jelas, sederhana, dan praktis.

Tabel 1 Kepemilikan dan Kelengkapan Dokumen KTSP

No.	Jenis Dokumen	Memiliki (%)	
		Kepala Sekolah	Guru
1.	Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006	100	72,72
2.	Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006	100	72,72
3.	Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006	100	72,72
4.	Model-Model Pengembangan Diri	100	63,63
5.	Model-Model Muatan Lokal	100	63,63
6.	Model-Model RPP	100	82,82
7.	Model-Model Silabus	100	82,82
8.	Model-Model KTSP	100	82,82
9.	Surat Edaran Mendiknas No. 33/MPN/se/2007 (Tentang Sosialisasi Kurikulum)	100	0,0
10.	Model-Model Pembelajaran IPA/IPS	90,9	54,54
11.	Model-Model Program Khusus (PLB)	54,54	36,36
12.	Model-Model Pembelajaran Tematik	54,54	36,36

## 3. Penyusunan KTSP

Seluruh responden menyatakan bahwa sekolah mereka telah menyusun KTSP. (100%). Menurut pernyataan responden, sebagian besar penyusunan dilakukan dengan cara adaptasi atau penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan sekolah (63,63%), disusun sendiri (27,27%), dan adopsi dari contoh-contoh yang ada (9,09%). Sedangkan responden guru yang menyampaikan sekolahnya telah

menyusun KTSP adalah 100%. Penyusunan dilakukan sebagian besar dengan cara adaptasi atau penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan sekolah, disusun sendiri dan adopsi dari contoh-contoh yang ada.

Berdasarkan pendapat responden, 63,63% kepala sekolah menganggap tidak sulit menyusun KTSP. Demikian pula 54,54% responden guru beranggapan demikian. Bagi yang merasakan kesulitan dalam penyusunan KTSP menyampaikan berbagai alasan, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2. Kesulitan dan Hambatan dalam Menyusun KTSP

No.	Aspek	Kesulitan dan Alasan
1.	Merumuskan Visi dan Misi Sekolah	menyamakan persepsi dengan semua guru & karyawan
2.	Merumuskan tujuan sekolah	kesesuaian antara tujuan sekolah dengan situasi, kondisi masyarakat
3.	Menetapkan mata pelajaran	Mata pelajaran mana yang diajarkan lebih banyak jamnya
4.	Menetapkan dan mengembangkan muatan lokal	SDM yg ada belum mampu, masih kurang memadai sarana dan prasarana pendukung
5.	Menetapkan dan mengembangkan kegiatan pengembangan diri	Belum ada tenaga pemikir/pakar dalam hal pengembangan diri
6.	Menetapkan pengaturan beban belajar	Kemampuan menyusun masih belum maksimal
7.	Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal	Sulit menentukan KKM karena harus melihat setiap SKL dan KD yang banyak
8.	Menetapkan kriteria kenaikan kelas	Jika siswa mendapat nilai yang sama untuk menetapkan kriterianya agak sulit namun sudah diulang dengan tes yang lain
9.	Menetapkan kriteria kelulusan	Tidak diberikan kepada pihak sekolah dalam pengambilan keputusan terakhir
10.	Menentukan pelaksanaan kegiatan pendidikan kecakapan hidup	Tidak semua bidang studi mudah dalam menerapkan pendidikan kecakapan hidup khususnya bidang studi PKN
11.	Menetapkan dan mengembangkan pendidikan berbasis keunggulan lokal	Tidak cukupnya panduan untuk itu
12.	Mengembangkan dan melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan global	Belum ada tenaga yang dipersiapkan untuk itu
13.	Menyusun kalender Pendidikan	Dalam penyusunan kalender pendidikan sudah disusun oleh dinas pendidikan disesuaikan dengan daerah masing-masing

No.	Aspek	Kesulitan dan Alasan
14.	Menjabarkan standar kompetensi/kompetensi dasar menjadi indikator	Dalam penyusunan berpedoman pada silabus yang ada buku yang dijadikan masih harus dirancang sendiri karena tingkat kesukarannya di tingkat kelas I, II, dan III
15.	Menyusun kegiatan pembelajaran	Dalam kegiatan pembelajaran terkendala pada waktu yang terbatas
16.	Menetapkan materi pokok	Ada perbedaan pada referensi pendukung sehingga harus penuh teliti berdasarkan tuntutan dan SI
17.	Menyusun bahan ajar	Masih kurangnya buku sumber yang ada di perpustakaan atau toko buku yang ada
18.	Menentukan strategi dan alat penilaian	Banyaknya tugas guru dalam penilaian yang terlalu rumit
19.	Menindaklanjuti hasil penilaian	Melakukan remedial terhadap siswa yang belum tuntas
20.	Menentukan alokasi waktu	Di alokasi waktu kadang-kadang tidak cukup karena siswa-siswi asik dengan percobaan-percobaan yang dicobanya karena jika belum berhasil siswa tidak akan meninggalkan tempatnya walaupun guru mengatakan sudah selesai jam pertemuannya
21.	Menerentukan sumber dan alat pembelajaran	Sulit mencari sumber dan alat untuk kompetensi tertentu
22.	Merumuskan tujuan pembelajaran	Membedakan KD dan indikator perlu pemahaman para guru
23.	Menyusun silabus	Cara mengembangkan indikator kegiatan pembelajaran/penilaian
24.	Menyusun RPP	Cara menentukan strategi/model pembelajaran/evaluasi

Tabel 2 menunjukkan masih terdapat inkonsistensi antara pemahaman isi dokumen berkaitan dengan KTSP dengan kesulitan yang dialami guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan dan menerapkan KTSP, yang sifatnya sudah harus menjabarkan secara teknis dan rinci.

Kendala yang mengemuka tentang penyusunan dokumen penataan kelembagaan sekolah adalah belum adanya Tim Pengembang KTSP di sekolah. Keengganan dalam menyusun KTSP di sekolah dipengaruhi oleh tidak tersedianya dana yang memadai untuk menyusun dokumen. Padahal peran tersebut sangat diharapkan oleh sekolah. Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa SMA yang membeli perangkat dokumen KTSP dari berbagai penerbit yang harganya cukup mahal.

Persoalan bagi guru yang paling dominan adalah menumbuhkan pembuatan model-model pembelajaran bagi guru. Kondisi ini menambah persoalan dalam implementasi KTSP di sekolah. Guru cenderung belum memanfaatkan model pembelajaran berbasis kearifan lokal serta belum tumbuh inovasi dalam pembuatan

model pembelajaran. Padahal, kunci suksesnya pelaksanaan KTSP adalah inovasi pembelajaran yang terpusat pada siswa. Ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan bantuan model pembelajaran namun belum termanfaatkan secara optimal. Hal ini, disebabkan oleh kekurangmampuan guru dalam mengadopsi perangkat pembelajaran yang dihibahkan. Keengganan pemanfaatan pembelajaran inilah menambah rumitnya penerapan KTSP di sekolah. Target agar sekolah yang mendapatkan bantuan peralatan pembelajaran agar ditularkan kepada sekolah lain belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

#### **4. Kesiapan SMA Di Kota Yogyakarta Dalam Melaksanakan KTSP**

Responden yang terdiri atas kepala sekolah dan guru dengan latar belakang pendidikan sebagian besar sarjana. 72,73 % responden kepala sekolah berpendidikan sarjana strata 1, dan 27,27 % berpendidikan sarjana strata 2. Sedangkan guru, 100 % adalah sarjana strata 1.

##### **a. Guru**

Kesiapan guru menghadapi implementasi KTSP dapat dilihat dari keseharian guru dalam melakukan pekerjaannya di sekolah. Di SMA N 5 Yogyakarta dan SMAN 3 Yogyakarta tampak terjadi perubahan cara mengajar guru yang cukup signifikan. Di kelas ini guru sudah cenderung tidak lagi menggunakan ceramah, kalaupun masih, tapi dibantu dengan penggunaan IT, baik tugas-tugas *download* di internet maupun tugas lainnya. Demikian juga yang terjadi di SMAN 4, meski tidak dipersiapkan secara khusus seperti di SMA N 7, akan tetapi banyak guru muda sudah mulai meninggalkan metode ceramah. Guru-guru (terutama guru muda) tampaknya juga telah terjadi perubahan cara mengajar. Meskipun metode ceramah itu yang paling disukai oleh kebanyakan guru, tapi untuk memenuhi tuntutan silabus dan RPP yang telah dibuatnya sendiri, guru harus menyesuaikan untuk mengubah cara mengajar, sesuai dengan kebutuhan cara belajar siswa. Perubahan lain yang bisa diamati di kalangan para guru terkait dengan kesiapan implementasi KTSP yaitu cara yang dilakukan guru dalam memberikan tugas kepada siswa, misalnya pemberian tugas yang beda untuk setiap siswa atau setidaknya tugas berdasarkan kelompok, persiapan materi ajar yang selalu dimodifikasi menjadi materi yang terbarukan, prosedur penilaian yang bervariasi, dan penciptaan suasana belajar yang menyenangkan. Meskipun demensi-demensi perubahan ini belum terwujud di tempat sekolah contoh yang diteliti, tapi perubahan sikap guru, pendekatan terhadap siswa, persiapan materi ajar, dan

kesiapan guru untuk melakukan suatu perubahan diri terlihat cukup direspon dengan baik.

Secara umum dari data yang berhasil dihimpun dari responden, kesiapan guru berkaitan dengan pengembangan dan penerapan KTSP oleh sekolah cukup memadai, kecuali dalam pengembangan bahan ajar mandiri. Lebih lengkap informasi tentang kesiapan guru dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel: 2 Kesiapan Guru dalam Pengembangan dan Penerapan KTSP

Aspek	Siap	Cukup Siap	Kurang Siap
a. Kualifikasi akademik	100	-	-
b. Penguasaan isi mata pelajaran	72,73	27,27	-
c. Menyusun kurikulum KTSP	36,36	54,55	18,19
d. Menyusun silabus	54,54	36,36	18,19
e. Menyusun RPP	54,54	36,36	18,19
f. Menilai kualitas kurikulum, silabus dan RPP	36,36	54,55	18,19
g. Menyusun bahan ajar (termasuk LKS)	36,36	54,55	18,19
h. Membuat sumber belajar mandiri	36,36	18,19	54,54

Dari tabel tersebut jelas bahwa secara umum guru telah siap dalam pengembangan dan penerapan KTSP dari kualifikasi akademik, penguasaan mata pelajaran, penyusunan kurikulum, silabus, dan RPP. Namun yang perlu dicermati dan ditingkatkan kompetensi guru adalah dalam melakukan pengembangan penilaian berbasis kompetensi, pengembangan bahan ajar serta pengembangan sumber belajar mandiri. Tampaknya guru belum konfiden dalam mengembangkan alat penilaian walaupun itu sudah dijalani sehari-hari, padahal dalam KTSP, seorang guru harus melakukan penilaian secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan bahan ajar yang meliputi buku teks, modul maupun referensi lainnya juga perlu dipertimbangkan karena guru lebih bergantung kepada penerbit buku.

### b. Kepala Sekolah

Untuk melihat apakah kepemimpinan kepala sekolah berlangsung dengan baik dimensinya dapat dilihat dari kepemimpinan dalam pelaksanaan administrasi, membina tenaga kependidikan, pendayagunaan sarana dan prasarana, serta bagaimana kepemimpinan sebagai manajer dan supervisor. Jika dimensi itu yang dilihat, maka SMAN 3 berada pada kesiapan yang paling bagus, kemudian disusul

SMAN lain. Hal itu terlihat dari sistem administrasi berjalan amat bagus, buku-buku, semacam buku informasi, desain program kurikulum, silabus hingga RPP masing-masing guru tersusun dengan rapi. Di SMAN 5 pun juga sistem administrasi berjalan cukup baik, akan tetapi tampilannya tidak sebagus SMAN 3 Yogyakarta, sistem administrasi masih belum tertangani dengan baik. Masih banyak data-data lama yang belum diperbaiki, sementara itu jika suatu ketika dibutuhkan salah satu data, maka tidak dapat ditemukan dalam waktu yang cepat. Dimensi kepemimpinan lainnya, yaitu pembinaan tenaga kependidikan, menunjukkan bahwa empat sekolah contoh menunjukkan hasil yang relatif sama. Artinya bahwa di sekolah tersebut para kepala sekolahnya memberi dukungan kepada guru untuk meningkatkan karir, baik menyertakan guru dalam kegiatan seminar maupun memberi kesempatan untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Dilihat dari pendayagunaan sarana dan prasarana, misalnya penerapan prinsip efisiensi penggunaan kelas, perawatan fasilitas yang telah dimiliki, optimalisasi fungsi sarana dan prasarana yang dimiliki.

**c. Karyawan/Pegawai**

Dari dimensi karyawan, implementasi KTSP juga menuntut kesiapan karyawan untuk mengoptimalkan peranannya dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, melaksanakan tugas-tugas pengelolaan perpustakaan, menangani layanan administrasi kesiswaan, dan penciptaan iklim kerja yang kondusif. Berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, observasi di 11 SMAN Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa di kalangan karyawan, umumnya memiliki etos kerja dan performa yang belum optimal. Hampir dapat ditemui di seluruh SMA bahwa mereka bekerja sangat rutin, dan jarang mangembangkan kreativitas dan inovasi.

**d. Siswa**

Muara implementasi KTSP akan tercermin pada perubahan sikap dan perilaku siswa setelah segala sesuatunya juga berubah. Perubahan itu antara lain kreativitas, daya inovasi, sikap kompetitif, sikap mandiri, dan sikap memiliki terhadap sesuatu program sekolah. Di empat sekolah contoh yang diteliti, ada dua sekolah yang perubahan sikap dan perilaku siswanya amat menonjol, yaitu pada siswa-siswi di SMAN 1 Yogyakarta dan SMAN 5. Di dua sekolah ini, siswanya tampak lebih disiplin, serius dalam belajar, kompetitif dalam berprestasi, aktif dalam berkegiatan ekstra-kurikuler, giat dalam berprestasi akademik maupun kegiatan non-akademik, seperti olah raga, kesenian, puisi dan drama, lomba olimpiade sains, dan siswa teladan. Secara umum responden menyatakan adanya perubahan sikap belajar putra/putri mereka yaitu peningkatan minat dan

semangat belajar yang signifikan dengan penerapan KTSP. Dengan demikian peningkatan pemahaman dan penguasaan KTSP secara konsep, strategi implementasi, dan teknik pelaksanaan perlu disosialisasikan lebih intensif, luas, dan efektif.

**e. Komite/Orang Tua Siswa**

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh gambaran bahwa umumnya (90,90%) orang tua siswa menyatakan bahwa KTSP berbeda dengan Kurikulum 2004, dan hanya 9,10% menyatakan tidak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi KTSP yang telah dilakukan cukup berhasil. Sebanyak ± 50 % menyatakan mengetahuinya dari sekolah sedangkan ± 50 % lagi tanpa penjelasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penyusunan KTSP pihak sekolah telah mensosialisasikan kepada orang tua melalui komite.

Lebih dari separoh (81,82%) responden yang berasal dari orang tua/komite berpendidikan sarjana strata 1, 9,10 % sarjana strata 2, 9,10% SLTA. Sebagian besar dari mereka memiliki pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil dengan rincian sebagai berikut: karyawan PNS sebanyak (63,63%), dan dosen 9,10%. Selebihnya (27,27%) memiliki pekerjaan berwiraswasta.

**f. Sarana dan Pendanaan**

Sebagian responden menyatakan sarana dan prasarana sekolah sebagai pendukung KTSP masing kurang memadai (63,64%), 36,36% menyatakan sangat baik (mendukung). Perlu dikritisi di sini bahwa pengembangan dan penerapan KTSP harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan karakteristik sekolah dan peserta didik. Ini berarti, bagi sekolah dengan sarana dan prasarana kurang memadai perlu mengembangkan KTSP yang sesuai dengan sekolah tersebut dan dapat dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Perlu juga ditingkatkan program mandiri pengembangan alternatif sarana, artinya sarana-sarana yang tidak tersedia atau rusak, sekolah dapat mengembangkan sendiri alternatif sarana yang tersedia dari lingkungan sekolah.

Sumber keuangan yang dimiliki suatu sekolah dapat peneliti kelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) pemerintah, (2) orangtua atau peserta didik, dan (3) masyarakat. Pada sekolah yang diteliti, karena semuanya merupakan sekolah negeri, sumber pemasukan sekolah relatif sama. Bedanya terletak pada besaran masing-masing sumber yang dapat diraih. Semua sekolah mendapat sumber anggaran dari pemerintah, yaitu dari APBD kota, dan Blok Grant seperti Bos, Unit Kelas Baru, Unit Gedung Baru, dan Program-program Pusat lainnya.

Jika dilihat dari aspek perencanaan pengelolaan keuangan, tampak bahwa semua sekolah melakukan perencanaan keuangannya dengan melibatkan seluruh komponen sekolah, di samping anggota dewan guru, komite sekolah, dan beberapa wakasek maupun kepala sekolah. Peneliti mengamati bahwa di kalangan guru tidak muncul prasangka tentang pengelolaan keuangan, karena di samping dilaksanakan sesuai dengan rencana, pengelolaan keuangannya pun relatif agak transparan.

#### **g. Lingkungan Fisik dan Sosial Sekolah**

Dimensi lingkungan, dapat peneliti bedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dilihat dari dimensi lingkungan fisik sekolah semua sekolah yang diteliti direspon oleh responden nyaman. Hampir semua sekolah tersebut letaknya di pinggir jalan besar, sehingga dari sisi lokasi dan akses transportasi ada kemudahan bagi para siswa, orangtua atau masyarakat pengguna. Suasana untuk proses belajar mengajar pun di hamper semua sekolah masih tergolong cukup ideal, karena suasana tidak terlalu bising dan gaduh, sehingga suasana belajar pun dapat berjalan dengan tenang dan lancar kecuali sekolah yang sangat dekat dengan jalan utama seperti SMAN 3 Yogyakarta.

Dimensi lingkungan sosial, menyangkut sistem nilai budaya, kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat sekitar sekolah, dan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran sekolah. Apakah kehadiran suatu sekolah dinilai tinggi oleh masyarakatnya, mungkin karena banyak memberikan manfaat? Apakah sistem nilai sosial-budaya yang dibangun oleh sekolah dapat terinternalisasi ke dalam masyarakat, sehingga sekolah dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya? Partisipasi orang tua maupun masyarakat desa terhadap pelbagai aktivitas yang dilakukan oleh sekolah amat baik. Sekolah ini mampu mengembangkan prinsip-prinsip interaksi sosial dengan baik. Relasi sosial yang dibangun antara komunitas kota dengan sekolah umumnya didasarkan atas kepentingan ekonomi, dan bukan karena sentuhan emosi dan perasaan. Tingkat kepeduliannya pun sebatas kepentingan pribadi dan bukan kepentingan sosial.

#### **5. Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya**

Secara umum, masih ada permasalahan dalam implementasi KTSP. Persoalan yang umumnya dialami oleh sekolah dalam menyusun KTSP menurut responden adalah pemahaman yang belum maksimal dari warga sekolah, terutama guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Upaya untuk mengatasi kesulitan adalah dengan terus meningkatkan pemahaman aspek-aspek

yang terdapat dalam KTSP serta peningkatan penggunaan TIK untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Caranya dengan mengadakan diklat, work shop, pertemuan rutin guru, KKG, dan KKKS. Strategi sekolah dalam mensosialisasikan KTSP kepada warga sekolah (guru, orang tua), dan masyarakat adalah dengan melakukan diskusi di antara guru, kepsek, serta warga sekolah lain dengan dibimbing oleh pengawas dan kepala UPT Dinas Pendidikan setempat.

Upaya sekolah dalam mendorong guru dalam melaksanakan KTSP antara lain dengan:

- a. memberi motivasi bagi guru dan *reward* bagi yang telah menyusun silabus dan RPP,
- b. memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti diklat dan banyak bertanya pada rekan sejawat yang lebih paham,
- c. Membantu memberikan petunjuk; mendatangkan tenaga ahli; mendatangkan tenaga LPMP.

#### E. Kesimpulan dan Saran

Kesiapan sekolah dalam implementasi KTSP mencakup kesiapan materiil dan kesiapan non-materiil. Kesiapan materiil meliputi perangkat kurikulum, kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan keuangan sekolah, kesiapan lingkungan sekolah. Kesiapan non materiil meliputi kepemimpinan kepala sekolah, kesiapan guru dan karyawan tingkat kesiapan masing-masing sekolah, kesiapan siswa dan orang tua. Faktor pendukung yang amat dirasakan oleh sekolah dalam mempersiapkan implementasi KTSP adalah kegiatan pelatihan yang dilakukan di sekolah secara berkesinambungan. Faktor penghambatnya adalah masih digunakannya sarana dan prasarana pendukung diimplementasikannya KTSP secara optimal.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif dan teratur terhadap pelaksanaan KTSP, memfasilitasi jaringan kerjasama antarsekolah penyelenggara sekolah yang sudah melaksanakan KTSP, memberikan layanan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh sekolah, dan mendukung pendanaan yang memadai yang diberikan kepada sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung jalannya KTSP pada sekolah-sekolah penyelenggara sekaligus sebagai bahan perencanaan bagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan KTSP. Sesuai dengan peran dan fungsinya LPMP berkoordinasi dengan Diknas Propinsi Yogyakarta untuk melihat kinerja pelaksanaan KTSP di sekolah dari sudut pandang kesiapan, kendala implementasi, peningkatan profesionalitas guru dan bantuan peningkatan elemen-elemen penting dalam menjalankan KTSP di Sekolah.

#### **Daftar Pustaka**

- Anik Gufron. (2003). *Implementasi Pendidikan Berbasis Kompetensi Bervisi Moral Bagi Sekolah, Peserta Didik dan Orang Tua*. Kedaulatan Rakyat tanggal 20 Mei 2003.
- Dedi Permadi, (1999). *Kepemimpinan Mandiri (Profesional) Kepala Sekolah*. Bandung: PT Sarana Panca Karya.
- Depdiknas, (2002). *Pola Induk Pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Umum (SMU)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- E. Mulyasa, (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- \_\_\_\_\_, (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- \_\_\_\_\_, (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Kunandar, 2007. *Guru Profesional, Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, Rajagrasindopersada, Jakarta.
- Muhammad Joko Susilo. (2007), *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nanang Fatah. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Oemar Hamalik, (2003). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003